

# RENCANA AKSI KEGIATAN 2020 - 2024



KANTOR KESEHATAN PELABUHAN  
KELAS II MATARAM

# LEMBAR PENGESAHAN

Rencana Aksi Kegiatan 2020-2024 telah diperiksa dan disetujui isinya

Mataram, Agustus 2020

Pejabat Pemeriksa :

1. H.Ali Sukmajaya,SKM.,MPH (Kasi PKSE)
2. H.Hari Gunawan,SKM.,MM (Kasi PRL)
3. H.Hartono,SKM (Kasi UKW)
4. H.Herman Nugraha,SKM.,MM (Kasubag TU)



Mengetahui :  
Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan  
Kelas II Mataram

**dr. I Wayan Diantika**  
NIP 196404141990101001

## KATA PENGANTAR

Dengan Rasa Syukur atas Rahmat Allah Yang Maha Kuasa atas Berkat dan Karunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram Tahun 2020-2024 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan ini bertujuan untuk Meningkatkan Pelayanan Kekarantinaan di pintu masuk negara dengan menjabarkan tujuan dan sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, target kinerja dan kegiatan.

Sebagai buku Rencana Aksi Kegiatan pertama untuk tahun RPJMN 2020-2024, kami merasakan buku ini masih memiliki banyak kekurangan karena dukungan data yang belum memadai terutama data-data yang digunakan sebagai bahan analisis situasi, prioritas program/ kegiatan, dan upaya rencana aksi. Selanjutnya kedepan akan terus disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan kegiatan dipintu masuk negara/ wilayah kerja. Diharapkan program dan kegiatan dalam RAK tahun 2020-2024 dapat dijadikan dasar dan acuan dalam melaksanakan upaya mencegah masuk keluarnya penyakit. Bagi kepala seksi dibawah satuan kerja, diharapkan RAK 2020-2024 dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Sasaran Kerja Pegawai.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berproses bersama dan mendukung tersusunnya Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2020-2024 ini, semoga buku ini menjadi dokumen bersama dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan Dukungan Manajemen semoga bermanfaat bagi kita semua.

Mataram, Agustus 2020

Kepala



**dr I Wayan Diantika**  
NIP 196404141990101001

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Kondisi Umum .....	2
C. Potensi Permasalahan .....	5
<b>II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS</b>	
A. Visi dan Misi .....	9
B. Tujuan .....	9
C. Sasaran Strategis .....	10
<b>III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA REGULASI</b>	
A. Arah Kebijakan .....	11
B. Strategi .....	11
C. Kerangka Regulasi .....	11
<b>IV. TARGET KINERJA DAN KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN</b>	
A. Target Kinerja .....	15
B. Kegiatan .....	16
C. Kerangka Pendanaan .....	17
<b>V. PENUTUP</b> .....	19
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis. RPJMN 2020-2024 akan memengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, di mana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*Upper-Middle Income Country*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sejalan dengan Visi Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yaitu Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong - Royong, dimana peningkatan kualitas manusia Indonesia menjadi prioritas utama dengan dukungan pembangunan kesehatan yang terarah, terukur, merata dan berkeadilan. Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat tersebut, dibutuhkan program kesehatan yang bersifat preventif dan promotif salah satunya adalah Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P). berbagai kegiatan dilakukan untuk mendukung pencegahan dan pengendalian penyakit, di pintu masuk negara dilakukan upaya kekarantinaaan.

Undang undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategi (Renstra). Selanjutnya merujuk kepada Keputusan Menteri Kesehatan nomor 21 tahun 2020 tentang Rencana Strategik Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 bahwa tingkat Eselon I menjabarkan dalam Rencana Aksi Program (RAP) dan Eselon II atau satuan kerja menjabarkan Rencana Aksi Kegiatan (RAK).

## B. Kondisi Umum

Gambaran kondisi umum pencegahan dan pengendalian penyakit di Satuan Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram dapat terlihat melalui kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan dan realisasi kegiatan tersebut dalam tahun sebelumnya. Tahun 2019 KKP Kelas II Mataram telah melaksanakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dilihat dari penyerapan dana dan pencapaian indikator output dari target yang telah ditetapkan.

Secara umum Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram Telah berhasil mencapai target dari indikator yang ditetapkan. Dalam mencapai kinerjanya, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram didukung oleh sumber daya anggaran yang berasal dari APBN. Sesuai DIPA Tahun 2019, anggaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit adalah sebesar Rp.17.127.966.000 (Tujuh belas milyar seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah). Ada penambahan anggaran untuk belanja pegawai pada tanggal 7 Oktober 2019 sebanyak Rp.1.900.000.000 (Satu milyar sembilan ratus juta rupiah), sehingga total anggaran Tahun 2019 menjadi Rp. 19.027.966.000 (Sembilan belas milyar dua puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan terealisasi sebanyak Rp.18.139.758.484 (Delapan belas milyar seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) atau 95,33%.

Adapun persentase capaian per output kegiatan pada Tahun 2019 adalah Layanan Kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB sebanyak 100%, Layanan Kekearifan Kesehatan tercapai 100%, Layanan Capaian Eliminasi Malaria 100%, Layanan Pengendalian Vektor dan BPP sebanyak 95,9%, Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS sebanyak 120%, Layanan Pengendalian Penyakit TB 100%, Layanan Sarana dan Prasarana Internal 100%, Layanan Dukungan Manajemen Satker 100% dan Layanan perkantoran sebanyak 100%.

Capaian PK Tahun 2019 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram adalah Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantina Kesehatan sebanyak 96,7%, Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP sebanyak 100%, Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit sebanyak 185%, Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus sebanyak 100%, Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah sebanyak 100%, Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan sebanyak

164,4%, Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi sebanyak 100%, Jumlah pelabuhan/bandara/ PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area sebanyak 100%, Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung sebanyak 154,5%, Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya sebanyak 110%, Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P sebanyak 144,3% dan Jumlah pengadaan sarana prasarana sebanyak 146,3%.

Sumber Daya Manusia pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram sampai dengan Tanggal 31 Desember 2019, jumlah pegawai 87 (Delapan puluh tujuh) orang dengan rincian sebagai berikut:

1. Menurut Jabatan :

Jabatan Struktural 5 orang, Jabatan Fungsional Umum 81 orang dan Jabatan Fungsional Tertentu sebanyak 1 orang.

2. Menurut Golongan :

Golongan I sebanyak 2 orang, Golongan II sebanyak 21 orang, Golongan III sebanyak 59 orang dan Golongan IV sebanyak 5 orang

3. Menurut Pendidikan :

SLTP sebanyak 2 orang, SLTA sebanyak 6 orang, D1 Kesehatan 2 orang, D3 sebanyak 35 orang, D4 sebanyak 2 orang, S1 sebanyak 27 orang, S2 sebanyak 13 orang.

Berdasarkan proporsi SDM yang dimiliki, mayoritas tingkat pendidikannya D3 keatas, diharapkan bisa memberikan kontribusi yang bermakna terhadap peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Secara bertahap terus dilakukan peningkatan kapasitas SDM melalui kegiatan pelatihan, workshop, seminar dan sebagainya. Peningkatan kuantitas SDM juga perlu dipertimbangkan mengingat beban kerja di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram cukup berat dengan 9 (sembilan) wilayah kerja yang bertugas memberikan pelayanan dipelabuhan/ bandara yang beroperasi selama 24 jam.

Struktur organisasi dan tata kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 356/MENKES/PER/IV/2008 tanggal 14 April 2008 Jo Permenkes Nomor 2348/MENKES/PER/XI/2011 tanggal 22 November 2011; Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.

Struktur organisasi KKP Kelas II Mataram terdiri atas :

1. Sub Bagian Tata Usaha
2. Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi
3. Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan
4. Seksi Upaya Kesehatan Lintas Wilayah
5. Wilayah Kerja
6. Instalasi
7. Kelompok jabatan fungsional

Uraian tugas masing-masing seksi/ sub bagian adalah :

1. Sub Bagian Tata Usaha Melakukan koordinasi dan penyusunan program, pengelolaan informasi, evaluasi, laporan, urusan tata usaha, keuangan, penyelenggaraan pelatihan, kepegawaian serta perlengkapan dan rumah tangga.
2. Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi Melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan kekarantinaan, surveilans epidemiologi penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, pengawasan alat angkut dan muatannya, lalu lintas omkaba, jejaring kerja, kemitraan, kajian serta pengembangan teknologi, pelatihan teknis bidang kekarantinaan dan surveilans epidemiologi di wilayah kerja bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara.
3. Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan Melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelaksanaan pengendalian vektor dan binatang penular penyakit, pembinaan sanitasi lingkungan, jejaring kerja, kemitraan, kajian dan pengembangan teknologi serta pelatihan teknis bidang pengendalian risiko lingkungan di wilayah kerja bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara.
4. Seksi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah Melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan koordinasi pelayanan kesehatan terbatas, kesehatan kerja, kesehatan mata, kesehatan haji, perpindahan penduduk, penanggulangan bencana, vaksinasi internasional, pengembangan jejaring kerja, kemitraan, kajian dan teknologi serta pelatihan teknis bidang upaya kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara.



5. Wilayah Kerja Merupakan unit kerja fungsional dilingkungan bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor kesehatan pelabuhan.

Wilayah kerja di pimpin oleh seorang koordinator yang ditetapkan oleh kepala KKP yang mana dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh kelompok jabatan fungsional dalam jabatan non struktural. Penetapan wilayah kerja dilakukan oleh Menteri Kesehatan, berdasarkan pengajuan kepala KKP dan pengusulan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan.

Wilayah kerja KKP Kelas II Mataram adalah sebagai berikut :

- a. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Lembar
- b. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Pemenang dan Ampenan
- c. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Kayangan
- d. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Pototano
- e. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Bima
- f. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Sape
- g. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Badas
- h. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Khusus Benete
- i. Lombok Internasional Airport (LIA)

Khusus untuk Lombok Internasional Airport (LIA) belum masuk dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No.356/MENKES/PER/IV/2008 tanggal 14 April 2008 Jo Permenkes Nomor 2348/MENKES/PER/XI/2011 tanggal 22 November 2011; Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan. Hal ini disebabkan karena pada saat diterbitkannya Permenkes ini, bandara tersebut baru saja beroperasi dan karena alasan operasional di bandara dan juga jarak yang cukup jauh dari kantor induk maka disamakan dengan wilayah kerja. Usulan untuk menjadi wilayah kerja sudah pernah disampaikan dan masih dalam proses penyelesaian di pusat sampai dengan saat ini.

### C. Potensi dan Permasalahan

Analisis potensi dan permasalahan di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram secara umum dapat kami sampaikan sebagai berikut :

#### 1. *Strenght* (Kekuatan)

Kekuatan yang dimiliki Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram adalah :

- a. Sarana Prasarana perkantoran yang dimiliki KKP Kelas II Mataram sudah cukup memadai walaupun masih perlu peningkatan seperti ketersediaan gedung bangunan di semua wilayah kerja, peralatan teknis dan fungsional, kendaraan operasional dan sebagainya.
  - b. Sumber daya manusia (SDM) dengan tingkat Pendidikan rata-rata DIII keatas dan usia yang masih sangat produktif.
  - c. Anggaran yang cukup untuk pelaksanaan semua kegiatan dan kesejahteraan pegawai (gaji dan tunjangan kinerja) yang teranggarkan setiap tahun.
2. *Weakness* (Kelemahan)
- a. Lahan gedung kantor di beberapa wilayah kerja, bukan milik Kementerian Kesehatan sehingga tidak bisa dilakukan pengembangan.
  - b. Letak kantor induk dan wilayah kerja Pulau Sumbawa cukup jauh dan dipisahkan oleh Selat Lombok sehingga sedikit mengalami kendala dalam melakukan komunikasi dan pelaporan (Jaringan internet sering mengalami gangguan)
  - c. Jumlah personil di wilayah kerja khususnya wilayah kerja Pulau Sumbawa relative masih kurang. Ada beberapa wilayah kerja menangani lebih dari satu pelabuhan/ bandara sehingga kesulitan dalam mengatur jadwal piket dengan petugas yang terbatas. Penambahan tenaga honorer untuk membantu pelaksanaan kegiatan tidak diperkenankan, ada aturan yang mengatur bahwa tenaga honorer tidak boleh melebihi 10% dari jumlah pegawai tetap.
3. *Opportunity* (Kesempatan/ Peluang)
- a. Masih ada peluang untuk mengusulkan sarana prasarana perkantoran sesuai kebutuhan setiap tahunnya melalui mekanisme RKBMN seperti gedung kantor, peralatan fungsional, kendaraan bermotor dan sebagainya.
  - b. Peningkatan kapasitas pegawai selalu teranggarkan biayanya setiap tahun sesuai kebutuhan dan kompetensinya.
  - c. Perkembangan teknologi yang semakin maju dengan tersedianya aplikasi-aplikasi yang menunjang pelaksanaan komunikasi cepat secara virtual, system penganggaran, pelaporan dan evaluasi kegiatan yang terpadu.
  - d. Koordinasi yang terjalin cukup baik dengan Lintas Sektor dan Lintas Program dalam menunjang pelaksanaan kegiatan di semua wilayah kerja KKP Kelas II Mataram.

#### 4. *Threats* (Ancaman)

- a. Wilayah KKP Mataram (Provinsi Nusa Tenggara Barat) terletak di wilayah yang rawan terhadap terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, banjir bandang, kebakaran dan sebagainya.
- b. Tingkat pendidikan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat relative masih rendah sehingga masih rentan untuk di provokasi untuk melakukan hal-hal yang negative dan berbau SARA.
- c. Beberapa wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat sering mengalami krisis air bersih dan kekeringan sehingga sangat rentan terjadinya gangguan Kesehatan. Selain itu wabah corona yang saat ini terjadi masih belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir sehingga sangat mengawatirkan.

Adapun permasalahan yang timbul dari pelaksanaan kegiatan Tahun 2019 pada masing-masing seksi adalah :

1. Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan Kesehatan, capaiannya dibawah target yang sudah ditentukan. Realisasi tidak mencapai target yang ditetapkan karena ada penurunan kunjungan kapal ke wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat khususnya pelabuhan-pelabuhan di Wilayah Pulau Lombok. Hal ini disebabkan karena secara ekonomi wilayah Pulau Lombok belum sepenuhnya pulih dari dampak gempa bumi yang terjadi pada akhir Tahun 2018 yang menelan korban jiwa cukup banyak. Disamping itu juga disebabkan oleh belum optimalnya operasional pelabuhan perikanan di Teluk Santong Sumbawa, Pelabuhan Teluk Awang di Lombok Tengah, Pelabuhan Tanjung Luar di Lombok Timur dan Pelabuhan Perikanan di Sape Kabupaten Bima.
2. Realisasi anggaran kegiatan P2PTVZ pada Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan masih dibawah 90%. Hal ini disebabkan karena sebagian besar kegiatan tersebut menggunakan Standar Biaya Keluaran (SBK). Terkait hal tersebut diatas, kegiatan di wilayah kerja yang menggunakan SBK tidak dapat dicairkan dananya karena kriteria pencairannya tidak terpenuhi. Begitu pula halnya dengan kegiatan pengendalian di P2PTVZ, harus ada data dukung berupa hasil pemeriksaan yang menjadi dasar dilakukannya pengendalian.

3. Belum semua Pelabuhan/ bandara di wilayah kerja KKP Kelas II Mataram memiliki dokumen rencana kontijensi. Ketersediaan dokumen tersebut di semua pelabuhan/ bandara wilayah kerja sangatlah penting mengingat akhir-akhir ini sering sekali terjadi musibah bencana alam dan bencana lainnya yang melanda wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat sehingga ketika suatu saat hal itu terjadi sudah bisa diantisipasi/ ditangani sesuai prosedur yang sudah disusun bersama. Koordinasi dan kerjasama semua pihak dari semua instansi yang terlibat sangatlah bermakna dan menjadi penentu keberhasilan penanganan. Permasalahan yang sering terjadi adalah sering kali dokumen rencana kontijensi yang sudah disusun, tidak bisa dipakai lagi karena adanya pergantian pejabat di beberapa instansi terkait sehingga perlu diadakan review setiap tahunnya. Hal ini tentunya memerlukan ketersediaan dana yang cukup untuk dapat mengundang lintas sector untuk melakukan reuiu ataupun simulasi-simulasi.

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

#### **A. VISI DAN MISI**

Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden yakni: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024, yakni: Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing, Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa, Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya, Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga, Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya dan Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2024, melalui Menurunkan angka kematian ibu dan bayi, Menurunkan angka *stunting* pada balita, Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional dan Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram sebagai unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian penyakit mendukung pelaksanaan penjabaran visi misi presiden yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

#### **B. TUJUAN**

Guna mencapai tujuan Kementerian Kesehatan khususnya Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Pengelolaan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram memiliki tujuan strategis yaitu Meningkatnya Pelayanan Kekekarantinaaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah.

### C. SASARAN STRATEGIS

Dalam mencapai tujuan strategis ditetapkan sasaran strategis yaitu meningkatnya faktor resiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan sebesar 100%.

### **BAB III**

#### **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA REGULASI**

##### **A. ARAH KEBIJAKAN**

Arah kebijakan dan strategi kegiatan KKP Kelas II Mataram adalah mendukung kebijakan dan strategi Ditjen P2P dan Kementerian Kesehatan yang didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi ditetapkan arah kebijakan KKP Kelas II Mataram sebagai berikut:

1. Penguatan deteksi dini dan respon terhadap penyakit dan faktor risiko
2. Penguatan akuntabilitas dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi.
3. Penguatan kapasitas dan pengembangan Sumber Daya manusia
4. Penguatan sinergisme, kolaborasi dan integrasi program

##### **B. STRATEGI**

Seperti yang telah ditetapkan di Bab sebelumnya, bahwa KKP Kelas II Mataram telah menetapkan tujuan strategis yang mendukung strategi program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2020 - 2024 serta mengacu pada Strategi Kementerian Kesehatan yang kemudian dijabarkan melalui strategi aksi kegiatan sebagai berikut:

1. Perluasan cakupan deteksi dini penyakit dan factor risiko
2. Peningkatan respon kejadian penyakit dan factor risiko
3. Peningkatan inovasi dalam deteksi dini dan respon penyakit dan factor risiko
4. Peningkatan komunikasi dan advokasi
5. Penguatan akuntabilitas
6. Peningkatan kapasitas sumber daya manusiis
7. Kerjasama lintas sector dan program

##### **C. KERANGKA REGULASI**

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana pelayanan, sebagai pelaksana pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan yang bermutu. Dalam menjalankan peran pemerintah ini tentunya membutuhkan dukungan regulasi yang menjadi landasan dan dasar hukum sehingga tidak salah arah dan mempunyai aspek perlindungan yang kuat.

Disamping peraturan perundang-undangan yang disusun oleh pusat juga diperlukan peraturan dalam bentuk Standar Operating Procedur (SOP) yang dibuat oleh satuan Kerja. Dukungan regulasi yang baik akan menjamin standar dan mutu dalam pelayanan.

Saat ini sudah tersedia regulasi, antara lain :

1. SOP kegiatan seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi
  1. Penerbitan buku Kesehatan kapal
  2. Penerbitan *International Certificate Vaccination (ICV)*
  3. Penerbitan SSCC/ SSCEC/ OME/ Sailing Permit
  4. Penerbitan Dokumen Kesehatan Kapal/ Pesawat
  5. Surveilans Epidemiologi
  6. Pelayanan Surat Keterangan Layak Terbang
  7. Pengumpulan bahan pelaksanaan/ reviu pelaksanaan table top/ simulasi KKM
  8. Penerbitan *Certificate of Pratique (COP)*
  9. Penerbitan *Port Health Quarantine Clearance (PHQC)*
  10. Penerbitan Surat Izin Angkut Jenazah
  11. Penerbitan Surat Izin Angkut Orang Sakit
  12. Pelaksanaan Surveilans terintegrasi antara pintu masuk dan wilayah
  13. Penyusunan kerangka acuan kerja (TOR)
  14. Pelaksanaan penindakan pelanggaran Kekarantinaan
  15. Penyelidikan epidemiologi
  16. Pengumpulan bahan rencana kontigensi KKM
  17. Pengawasan penumpang kapal penyeberangan dalam status karantina
  18. Pengawasan penumpang kapal pelayaran nasional dalam status karantina
2. SOP kegiatan seksi Pengendalian Risiko Lingkungan
  1. Pengawasan hygiene dan sanitasi kapal dan pesawat
  2. Pengawasan factor risiko kebisingan di Pelabuhan dan bandara
  3. Pengawasan hygiene dan sanitasi asrama haji
  4. Pengawasan hygiene dan sanitasi TTU dan TPP
  5. Pengambilan sampel kimia dan bakteriologis air di kapal dan pesawat
  6. Pengambilan sampel kimia dan bakteriologis air di pelabuhan dan bandara
  7. Pengambilan sampel kimia dan bakteriologis air di asrama haji dan TPP
  8. Pengawasan sarana air bersih di pelabuhan dan bandara
  9. Pengawasan hygiene dan sanitasi jasa boga pesawat



10. Pengawasan hygiene dan sanitasi catering jamaah haji
  11. Pengawasan Kesehatan penjamah makanan
  12. Pengambilan sampel bakteriologis makanan di TPP
  13. Pengawasan pencemaran udara, limbah dan sampah di Pelabuhan dan bandara
  14. Pelaksanaan survei lalat dan pengendalian lalat
  15. Pelaksanaan survei anopheles dan pengendalian nyamuk anopheles
  16. Pelaksanaan survei pengamatan dan identifikasi tikus dan pinjal
  17. Pelaksanaan pengawasan deratisasi dan disenseksi pada alat angkut
  18. Survei dan pengendalian *Aedes aegypti* di Pelabuhan dan bandara
  19. Pelaksanaan survei kecoa dipelabuhan dan bandara
  20. Pelaksanaan perawatan peralatan fungsional
3. SOP kegiatan seksi Upaya Kesehatan Lintas Wilayah
1. Pemeriksaan hemoglobin metode sahli
  2. Pemeriksaan leukosit, jumlah trombosit dan laju endap darah
  3. Pemeriksaan golongan darah
  4. Pemeriksaan gula darah, asam urat, kolesterol
  5. Pemeriksaan malaria pada sediaan apus darah dan widal
  6. Pemeriksaan urine, sedimen dan kehamilan
  7. Pengelolaan sampah dan limbah medik
  8. Pengukuran sasaran mutu pelayanan laboratorium
  9. Pemeriksaan feces dan sediaan dahak
  10. Pelaksanaan pemeriksaan kelaikan terbang
  11. Penyimpanan dan pemeliharaan vaksin
  12. Vaksinasi internasional
  13. Pemeriksaan Kesehatan jamaah haji
  14. Penatalaksanaan pasien gagal jantung
  15. Penanganan pasien penyakit menular (Ebola, Cacar, Avian Influenza, Demam Kuning, Antrax, SARS, Hepatitis)
4. SOP kegiatan Sub Bagian Tata Usaha
1. Pengelolaan agenda surat masuk dan keluar
  2. Inventarisasi dan penghapusan BMN
  3. Penatalaksanaan arsip
  4. Penerimaan pegawai Non ASN

5. Pelaksanaan tes tertulis dan wawancara penerimaan karyawan Non ASN
6. Pembuatan daftar usulan penilaian angka kredit (PAK)
7. Pengelolaan absensi pegawai
8. Pengelolaan dokumen file pegawai
9. Ijin meninggalkan tugas/ tidak masuk kerja
10. Survei kepuasan masyarakat
11. Pengaduan dan penanganan laporan masyarakat
12. Pelaporan gratifikasi

**BAB IV**  
**TARGET KINERJA DAN KEGIATAN**

Memperhatikan Rencana Aksi Program Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tahun 2020-2024, Tujuan, Arah Kebijakan, Strategi dan Sasaran Strategis sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka target kinerja dan kerangka pendanaan program dan kegiatan KKP Kelas II Mataram 2020-2024.

**A. TARGET KINERJA**

Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian program yang diukur secara berkala dan dievaluasi pada akhir tahun 2024. Sasaran kinerja dihitung secara kumulatif selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2024.

Tabel..  
Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis  
RAK KKP Kelas II Mataram 2020-2024

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator
1	Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	Meningkatnya faktor resiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan sebesar 128.200</li> <li>2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan sebesar 90%</li> <li>3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara sebesar 85%</li> <li>4. Nilai kinerja anggaran sebesar 80</li> <li>5. Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan sebesar 80%</li> <li>6. Kinerja implementasi WBK satker sebesar 70</li> <li>7. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL sebesar 45%</li> </ol>

## B. KEGIATAN

Dalam rangka menjamin tercapainya Tujuan Strategis, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis, maka ditetapkan Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan Rencana Aksi Kegiatan 2020-2024.

Sasaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram Adalah Meningkatnya faktor resiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan, Untuk mencapai sasaran hasil, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah:

1. Indikator Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan

Kegiatan yang dilakukan :

- a. Pemeriksaan dan screening TB Paru di wilayah kerja
  - b. Pemeriksaan dan screening HIV AIDS
  - c. Sosialisasi vaksinasi internasional (ICV)
  - d. Pemeriksaan alat angkut sesuai standar kekarantinaan Kesehatan (Penerbitan PHQC, COP, SSCEC/SSCC, Pemeriksaan Gendec, MDH, dll)
  - e. Pemeriksaan Barang pada alat angkut
  - f. Pemeriksaan lingkungan (TTU, TPP, Kualitas Air, Kualitas Udara)
  - g. Bimtek pelaksanaan kegiatan pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan
  - h. Peningkatan kualitas SDM teknis
  - i. Pelabuhan/ bandara sehat
2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan.

Kegiatan yang dilakukan :

- a. Layanan kesehatan rutin poliklinik KKP
- b. Layanan kesehatan rujukan dan respon cepat
- c. Verifikasi dan pengawasan RS/ Klinik yang melaksanakan penerbitan ICV
- d. Layanan pengendalian factor risiko pada alat angkut
- e. Layanan pengendalian factor risiko lingkungan
- f. Layanan pengendalian factor risiko pada situasi khusus
- g. Layanan kesiapsiagaan menghadapi KKM
- h. Pengadaan bahan pengendalian factor risiko penyakit pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan.

3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara  
Kegiatan yang dilakukan :
  - a. Surveilans epidemiologi
  - b. Desiminasi hasil surveilans dengan LS/LP
  - c. Respon sinyal SKD KLB
  - d. Penyusunan rencana kontigency
  - e. Pencegahan dan penindakan pelanggaran kekarantinaan Kesehatan
4. Nilai kinerja anggaran  
Kegiatan yang dilakukan :
  - a. Penyusunan rencana program dan anggaran
  - b. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
  - c. Monev DJA dan Bappenas
5. Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan  
Kegiatan yang dilakukan :
  - a. Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan
  - b. Rekonsiliasi pengelolaan PNBPN ke wilayah kerja
  - c. Layanan perkantoran
6. Kinerja implementasi WBK satker  
Kegiatan yang dilakukan :
  - a. Pelayanan umum, rumah tangga dan perlengkapan
  - b. Inventarisasi Dumas, Pengelolaan UPG, WBK dan WBBM
  - c. Pengelolaan Arsip dan Kantor Berhias
7. Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL  
Kegiatan yang dilakukan :
  - a. Layanan kepegawaian
  - b. Peningkatan kapasitas SDM jabatan fungsional
  - c. Penyusunan ABK, Peta dan Informasi Jabatan

### **C. KERANGKA PENDANAAN**

Guna memenuhi kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Kegiatan sebagaimana tersebut diatas dapat bersumber dari APBN baik yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pendanaan Bersumber APBN  
Tahun 2020-2024

No	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target					Alokasi (Dalam ribuan)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	KKP Kelas II Mataram						16.132.359	15.200.930	15.300.000	15.350.000	15.400.000
1	Jumlah pemeliharaan orang alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan.	128.200	128.200	128.300	128.350	128.400					
2	Persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90%	90%	90%	90%	90%					
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	85%	85%	85%	85%	85%					
4	Nilai kinerja anggaran	80	80	80	80	80					
5	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	80%	80%	80%	80%	80%					
6	Kinerja implementasi WBK satker	70	70	70	70	70					
7	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	45%	45%	45%	45%	45%					

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mataram Tahun 2020-2024 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya KKP Kelas II Mataram dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dengan demikian, seksi di KKP Kelas II Mataram mempunyai target kinerja yang telah disusun dan akan dievaluasi pada pertengahan periode (2022) dan akhir periode 5 tahun (2024) sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyusunan dokumen ini melibatkan semua seksi di KKP Kelas II Mataram. Oleh karena itu kepada semua pihak yang telah berkontribusi disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Diharapkan melalui penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) KKP Kelas II Mataram, upaya dukungan manajemen memberikan kontribusi yang bermakna dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit khususnya dan umumnya pembangunan kesehatan untuk menurunkan angka kematian, kesakitan dan kecacatan akibat penyakit serta pencapaian sasaran program berdasarkan komitmen nasional dan internasional.

Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada dokumen ini, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

## PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5
1	Terselenggaranya pengendalian faktor risiko dipintu masuk negara	1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, Barang dan lingkungan	Kasi PKSE, Kasi PRL dan Kasi UKLW
		2	Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Kasi PKSE, Kasi PRL dan Kasi UKLW
2	Terwujudnya pengendalian faktor risiko di Pintu masuk negara	3	Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk negara	Kasi PKSE, Kasi PRL dan Kasi UKLW
3	Meningkatnya tata kelola manajemen KKP	4	Nilai kinerja anggaran	Kasubag TU
		5	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	Kasubag TU
		6	Kinerja implementasi WBK satker	Kasubag TU
		7	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	Kasubag TU



**MATRIKS RENCANA AKSI KEGIATAN**  
**TAHUN 2020 – 2024**

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL (DO)	CARA PERHITUNGAN	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, Barang dan lingkungan	Jumlah pemeriksaan penafisan orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang dilakukan	Kumulatif jumlah Pemeriksaan/ Penapisan orang (TB, HIV, ICV, HAC), Pemeriksaan alat angkut sesuai standar karantina, pemeriksaan barang dan Pemeriksaan Lingkungan {TTU, TPM, air, udara}	128.200	128.200	128.300	128.350	128.400
2	Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan pada indikator No.1	Persentase Faktor Risiko yang dikendalikan pada orang, barang, alat angkut dan lingkungan	90%	90%	90%	90%	90%
3	Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk negara	Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk negara	Persentase kelengkapan data surveilans, Jumlah sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam, Penyusunan rencana kontigensi, index pinjal, HI perimeter, tidak ditemukan larva anopheles, kepadatan kecoa rendah, kepadatan lalat < 2, TTU memenuhi syarat, TPM laik hygiene dan air bersih memenuhi syarat	85%	85%	85%	85%	85%
4	Nilai kinerja anggaran	Nilai kinerja anggaran berdasarkan aplikasi SMART DJA	Menggunakan hasil penilaian kinerja dari SMART DJA Kementerian Keuangan	80	80	80	80	80
5	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan berdasarkan OM SPAN	Menggunakan hasil penilaian tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan dari OM SPAN Kementerian Keuangan.	80%	80%	80%	80%	80%
6	Kinerja implementasi WBK satker	Nilai implementasi WBK berdasarkan self assesment	Penilaian berdasarkan self assesment	70	70	70	70	70
7	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	ASN yang mendapatkan peningkatan kapasitas sebanyak 20 JPL dalam kurun waktu 1 (satu) tahun	Persentase ASN yang mendapatkan peningkatan kapasitas sebanyak 20 JPL dalam kurun waktu 1 (satu) tahun	45%	45%	45%	45%	45%